

**POLITIK HUKUM PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
KENDAL
TENTANG
REINTERPRETASI DAN AKUNTANSI ZAKAT
TESIS**



**OLEH
ROZIKHAN**

**NIM : 0.000.000.034
PROGRAM STUDI : MAGISTER STUDI ISLAM
KONSENTRASI : HUKUM POLITIK ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

Prof. Dr. H. M. Zuhri

Dosen Pembimbing Magister Studi Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Drs. H. Syamsul Hidayat, MA

Dosen Pembimbing Magister Studi Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Pembimbing

Hal : Tesis Saudara Rozikhan

Kepada Yth.

Ketua Program Magister Studi Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

Nama : Rozikhan

NIM : O.000.000.034

Judul : **Politik Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kendal
tentang Reinterpretasi dan Akuntansi Zakat.**

Maka dengan ini kami dapat menyetujuinya.

Selanjutnya bersama ini kami sampaikan bahwa Tesis Saudara yang bersangkutan dapat segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juni 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. M. Zuhri

Drs. H. Syamsul Hidayat, MA

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : ROZIKHAN

NIM : O.000.000.034

Program Studi : Magister Studi Islam

Konsentrasi : Hukum Politik Islam

Judul Tesis : Politik Hukum Muhammadiyah Kendal tentang Reinterpretasi
dan Akuntansi Zakat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang telah diberikan dicabut dan dibatalkan oleh universitas.

Surakarta, 15 Juli 2006

Yang Membuat Pernyataan

Rozikhan

ABSTRACT

Zakat research by title “Political Law of Muhammadiyah Kendal Organization about *Zakat* Reinterpretation and Accountancy” are Islamic law research on thesis’ book *Zakat Kita* created by Abdul Barie Shoim which became guideline for leader and community of Muhammadiyah Kendal since 1979.

This research included as qualitative research with primary data from book of *Zakat Kita* and the realization report from Weleri District which consists of 17 sub-district or Muhammadiyah’s branch. The next step is cross-check this primary data, in report form, with the leader of Muhammadiyah’s branch as a key person.

This norms Islamic law research use *Sui Generis*-kum-empiris method. The meaning is the norms of law not only look for in Syari’ah text, but also on empiric human-life reality and the habitual of the community, then re-construct and confront it with something ideal on dialectic relation between syari’ah text and existential human experience on one of social location which will give observation on how that syari’ah text understood, interpret, and apply it.

If thesis’ book *Zakat Kita* approach with political law, it is more nearly to Muhammadiyah’s Kendal Organization wisdom in purpose to avoid law emptiness on *zakat*’s law application when all of property item which is the object of *zakat* doesn’t reach nishab and also only 2.5% for *zakat*’s tariff. This policy prudence that look like out from the *nash*’s text which is *qath’i*, *Maqashid Syari’ah* which has *mashlahah* nuance, is the solution for this problem.

ABSTRAK

Penelitian zakat yang berjudul “Politik Hukum Persyarikatan Muhammadiyah Kendal tentang Reinterpretasi dan Akuntansi Zakat” merupakan penelitian hukum Islam terhadap tesis buku *Zakat Kita* karya Abdul Barie Shoim yang dijadikan rujukan dan panduan oleh pimpinan dan masyarakat Muhammadiyah Kendal sejak tahun 1979.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan data primer dari buku *Zakat Kita* dan laporan pelaksanaannya dari Kecamatan Weleri yang terdiri dari 17 kelurahan atau ranting Muhammadiyah. Data primer yang berbentuk laporan kemudian dilakukan *cross check* dengan pimpinan cabang Weleri sebagai *key person*.

Penelitian norma-norma hukum Islam ini menggunakan metode *Sui Generis*-kum-empiris. Artinya, norma-norma hukum tidak hanya dicari dalam teks syari’ah, tetapi juga dalam realitas empirik kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri, yang kemudian direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam hubungan dialektis antara teks syari’ah dan pengalaman eksistensial manusia dalam lokasi sosial tertentu yang akan memberi wawasan, bagaimana teks syari’ah itu dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan.

Tesis buku *Zakat Kita* jika didekati dengan Politik Hukum, lebih merupakan kebijakan persyarikatan Muhammadiyah Kendal agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam menerapkan hukum zakat, ketika keseluruhan item harta yang menjadi obyek zakat tidak menyentuh nishab demikian pula tarif zakatnya yang hanya 2.5%. Kebijakan yang seolah keluar dari teks nash yang qath’i ini, *Maqashid Syari’ah* yang bernuansa mashlahah merupakan solusi dari problem ini.

KATA PENGANTAR

Minat saya untuk menulis tesis yang berjudul “*Politik HUKUM Muhammadiyah tentang Reinterpretasi dan Akuntansi Zakat*” telah muncul tiga tahun yang lalu. Beberapa referensi yang mendukung tulisan inipun sudah saya kumpulkan. Namun, tidak dapat diketahui hasrat yang sudah lama itu tidak segera muncul kecuali setelah bertemu Drs. H. Syamsul Hidayat, MA pada Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Purwokerto.

Obsesi untuk meneliti pelaksanaan zakat Muhammadiyah Kendal ini karena zakat di daerah ini pengumpulannya berjalan optimal. Tetapi ada yang mengganggu pikiran saya waktu itu, bahwa pedoman yang digunakan oleh Muhammadiyah Kendal dalam buku *Zakat Kita* tidak sejalan dengan Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tentu ini merupakan preseden dalam tubuh organisasi Muhammadiyah.

Pengamatan penulis terhadap kasus ini relatif cukup lama, karena setiap sebulan sekali pada hari Ahad mulai jam 06.00 saya terlibat sebagai penceramah dalam kajian bersama dengan masyarakat di Kecamatan Weleri. Kesungguhan mereka dalam meningkatkan ilmu keagamaan relatif cukup tinggi, terutama dalam berinfak. Hal ini terbukti pada setiap kajian ahad pagi itu dana infak yang terkumpul kurang lebih mencapai Rp 700.000,-

Kajian Ahad Pagi ini merupakan media informasi dan sosialisasi apapun, termasuk didalamnya zakat. Belum ada uji materi terhadap buku *Zakat Kita* yang dijadikan pedoman bagi persyarikatan ini.

Agar lebih mendalam kajian saya, diskusi sering saya lakukan dengan saudara Drs. Yasin Asy’ari, SH di kantor, beberapa buku dapat saya lengkapi, begitu juga beberapa buku yang dipinjamkan kepada saya.

Saya berhutang budi kepada beberapa individu dan lembaga yang mendukung studi saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Pertama*, kepada Prof. Dr. H. M. Zuhri yang selalu mendorong agar tesis saya segera selesai. Demikian pula Prof. Dr. H. Abu Su’ud. *Kedua*, kepada Dr. H. Muinudinillah, yang memperluas cakrawala akademik saya yang tidak pernah terlupakan.

Secara khusus saya ingin memberikan apresiasi kepada terutama anak saya Reza Syauqi Falasev, Reckta Qudwiana Anamyakhan, dan Rifda Illahy Rosihan yang mempunyai andil besar dalam penyusunan tesis ini. Anak saya yang terakhir Revy Amyneva Gulnoria, dia lahir ditengah studi saya yang penuh dinamika. Juga kepada Hj. Nurul Hikmawati pendamping hidupku, *for her love and patience*. Saya berharap mereka dapat belajar dari saya untuk selalu menghargai ilmu.

Pada akhirnya, terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada UMS yang memberi kesempatan waktu menyelesaikan studi ini dan kepada Muhammadiyah Jawa Tengah yang telah membesarkan saya, yang justru tesis ini selesai saat saya diberi amanah menjadi Wakil Ketua PWM Jawa Tengah.

Surakarta, 15 Juli 2006

Penulis

Rozikhan

MOTTO

- LA MASAGHA LIL IJTihad FIIMA FIIHI NASHSHUN SHARIHUN
QOTH'IYYUN.
- TAGHYIIR AL FIHKAM BI TAGHAYYUR AL AZMINAT WAL
AMKINAT.
- AINAMA WUJIDAT AL MASHLAHAH FA TSAMMA SYAR' ALLAH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga Muhammadiyah secara umum dan para pengelola Tarjih secara khusus harus mewaspadaikan bahwa penekanan secara berlebihan pada bentuk monolitik dalam manifestasi pengalaman keberagamaan yang serba ditentukan secara resmi dari atas dapat menjurus pada formalisme yang kering.

Kekuatan suatu *hujjah* suatu *item* agama yang ditentukan oleh jenjang hierarkis kelembagaan dalam produk keseragaman lahiriah, secara substansial dapat mengurangi semangat pengalaman beragama. Karena dalam Islam tidak ada doktrin tentang lembaga kependetaan yang memiliki otoritas spiritual, *la rohbaniiyyah fil Islam*.

Fungsi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam karena lebih bersifat administratif organisatoris dan tidak bersifat *spiritual religius*, meskipun *ijtihad kolektif* atau *ijtihad jma'i* dipilih sebagai model ijtihad, hal itu jangan sampai menafikkan kesempatan memanifestasikan pengalaman agama melalui *ijtihad fardi*.¹

Penutupan *ijtihad fardi* berarti meniadakan kesempatan secara personal sebagian warga masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi aktif dalam dialog teks dalam menjawab berbagai persoalan sosial, karena telah dicukupkan dan menerima hasil (*by product*) keputusan dari sekelompok orang yang terlibat

¹ Syamsul Anwar, Seminar Nasional "Pengembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah antara Purifikasi dan Dinamisasi" 22-23 Juni 1996 di UMY.

dalam *ijtihad jama'i*. Dalam kondisi semacam ini yang akan terjadi adalah penyempitan pintu *ijtihad* dan melebarnya *pintu taqlid*.

Amanat Mukhtar Muhammadiyah Ke-43 di Banda Aceh agar “Respon keagamaan yang bersifat pluralistik terhadap modernitas perlu dicermati oleh Muhammadiyah, karena itu aspek keagamaan perlu lebih serius ditekuni oleh warga Muhammadiyah dan Muhammadiyah tidak boleh lepas dari problema modernitas dalam hubungannya dengan kehidupan spiritualitas keagamaan yang demikian.” (*Program Muhammadiyah 1995-2000, huruf E.a.*)

Progresifitas pemikiran keagamaan dan pemunculan gagasan alternatif akan meluas dan berkembang di kalangan warga Muhammadiyah jika *ijtihad fardi* memperoleh posisi signifikan dalam persyarikatan, sekalipun keabsahannya secara kelembagaan perlu pengujian serius untuk menjadi sebuah pedoman.

Produk *ijtihad* Muhammadiyah dapat dipandang sangat efektif karena Muhammadiyah melestarikan hasil *ijtihad*nya melalui lembaga lembaga pendidikan formal dalam lingkungan Muhammadiyah melalui instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada seluruh anggota. Cara yang ditempuh oleh Muhammadiyah semacam itu menimbulkan kesan seakan Muhammadiyah telah membentuk sebuah mazhab yang dapat menjurus kepada pemupukan sikap taklid.²

Taklid merupakan musuh utama dalam Muhammadiyah. Dan karenanya dalam pandangan Muhammadiyah, nilai otoritatif dari suatu pendapat tidak diletakkan pada kenyataan bahwa pendapat itu difatwakan oleh seorang tokoh

² Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993) hal.176.

atau madzhab yang diikuti, akan tetapi diletakkan pada dalil yang menjadi landasannya.³

Koreksi dari siapapun akan diterima, dari dukungan dalil yang lebih kuat tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi hasil putusan Majelis Tarjih, karena prinsip terbuka dan toleran merupakan *manhaj majelis tarjih* dalam menetapkan keputusan.⁴

Ijtihad Jama'i sebagai sistem *manhaj majlis tarjih* dalam menetapkan masalah ijtihadiyah masih dapat dilakukan sepanjang tidak bersentuhan dengan wilayah *ta'abbudy*. Artinya, pelaksanaan keberagamaan wilayah *ta'aqquli*, atau dataran reasonabel ruang geraknya masih longgar untuk dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dimensi *mu'amalah* dengan cakupan yang sangat luas belum terekam dalam kodifikasi tarjih Diskursus *ta'abbudy* dan *ta'aqquly* melebar, bagaimana pemahaman dalil dalam ibadah yang menggunakan akal.

Asymuni Abdurrahman dalam bukunya *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, metodologi dan aplikasi memberi ilustrasi tentang perintah menghadap *kiblat dalam salat*. Perintah itu tidak diketahui tujuannya, menghadap Ka'bah Baitullah, tetapi dapat *dipikirkan* cara penentuan tempatnya bagi penduduk yang jauh seperti Indonesia, Pemahaman perintah tersebut dapat menggunakan *ilmu* penentuan arah kiblat.

³ A.Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990) hal.72 – 73.

⁴ PP.Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Buku Panduan Muktamar Majelis Tarjih XXII*, (Malang.:1989), hal.23. Selanjutnya disebut “Pokok –pokok Manhaj Majelis Tarjih.”

Tidak berbeda halnya dengan *zakat*. Dalam perkembangan masa dan perubahan sosial, melaksanakan *zakat* yang menurut ulama klasik masuk dalam klasifikasi *ibadah mahdlah* pelaksanaannya dapat menggunakan *akal pikiran*. Karena *obyek zakat* menjadi sangat beragam. Demikian pula Indonesia yang struktur geografisnya berbeda dengan jazirah Arab obyek zakat dan beragam variasi penghasilan diversikatip mengundang *akal fikiran* para ahli untuk melakukan *ijtihad*.

Pemikiran pemahaman dalil terhadap masalah yang dapat *diketahui tujuannya* diklasifisir dalam rumpun ibadah yang *ma'qulatul ma'na* dan berada dalam wilayah *ijtihadiyah*.⁵

Ketika merujuk Alqur'an, *zakat* termasuk ibadah yang dapat *diketahui tujuannya*. Membersihkan harta lewat zakat dimaksudkan untuk menghindarkan sifat kikir dan mewujudkan pemerataan pendapatan agar masyarakat sejahtera. Alqur'an Surah *al Hasyr* ayat 7 dan *al Ma'arij* ayat 24 memberi isyarat untuk itu. Karena itu zakat hanya dibebankan kepada mereka yang kaya (*zhahril ginaa*).

Mengukur obyek kekayaan masyarakat pada suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Dari teks kenabian diperoleh informasi, diantaranya salah satu obyek zakat adalah domba, dan pemiliknya akan menjadi subyek zakat ketika telah mencapai 40 ekor sampai 120 ekor dengan kewajiban zakat seekor kambing.⁶

⁵ Asymuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002) hal.78.

⁶ Ibnu Hajar Al 'Asqolany, *Fath Albaari Syarh Shohih Al Bukhory*, (Beirut:Daar el kutub al 'ilmiyyah) Jil. I, hal. 838.

Jika dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki kekayaan sejumlah kambing seperti tersurat dalam teks kenabian, tetapi mempunyai *ragam kekayaan* yang jumlah nominalnya *senilai* kambing yang menjadi subyek zakat, maka secara empiris tidak ada keharusan membayar zakat, sementara kekayaan yang diperoleh dari hasil usahanya melebihi *item* yang telah ditetapkan oleh Nabi.

Muhammadiyah Kabupaten Kendal telah mempersoalkan zakat tidak lagi memahaminya seperti yang telah ditetapkan oleh Nabi saja, yakni kekayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di jazirah Arab pada waktu itu, yang secara lokal sumber kekayaannya hanya terbatas dari tanaman, hewan ternak, emas-perak, dan belum mengakses sumber kekayaan lain sebagai obyek zakat.

Pemahaman tersebut berimplikasi pada *reinterpretasi*⁷ yang mempunyai arti *give on additional or new interpretation to . . .* yaitu memberi tambahan / penambahan dari suatu masalah, dari masalah lain atau membuat penjelasan baru mengenai suatu masalah.

Penjelasan baru mengenai masalah zakat oleh Muhammadiyah kabupaten Kendal dari fiqh klasik dapat dipetakan sebagai berikut :

⁷ Merio Pei, *The New Grolier Webster International Dictionary* : Vol. II, page 808.

No.	Konsep Zakat Ulama Fiqh Kendal ⁸	Konsep Zakat dalam Fiqh ⁹
1.	<p><i>Amwal</i> adalah seluruh harta/ kekayaan terpadu sebagai rizki dari Allah yang menjadi hak milik seseorang dan diambil manfaatnya. Di saat yang sama di sana juga ada hak mutlak sosial yang harus dikeluarkan minimalnya zakat. Zakat 2,5 % setiap tahun dikeluarkan dari hasil keseluruhan harta tersebut.</p>	<p>Tidak ada konsep kekayaan terpadu karena dalam fiqh, harta seseorang ketika akan dizakatkan diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis harta tertentu, seperti harta perdagangan, emas-perak, pertanian, dll. Masing-masing jenis zakat tersebut wajib dikeluarkan zakatnya jika sampai nisab dan haul.</p>
2.	<p>Tidak ada pemisahan antara harta berkembang dan tidak berkembang, karena seluruhnya merupakan <i>amwal</i> (harta-harta) sehingga semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya. Perbedaanya terletak pada, jika harta yang</p>	<p>Syarat harta wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang, yaitu yang memberikan keuntungan atau pertumbuhan dalam kekayaan tersebut. Harta-harta yang tidak</p>

⁸ K.H.Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, (PDM Kabupaten Kendal Jateng) hal. 4 – 11.

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin (penerjemah) (Litera Antar Nusa dan Mizan) hal. 122 -166. Perbandingan bisa dilihat juga dalam *Revitalisasi Filantropi Islam* (PBB UIN Jakarta) hal. 154 -155.

	berkembang dikeluarkan zakatnya setiap tahun, namun harta yang tidak berkembang (seperti rumah dan kendaraan) untuk dipakai sendiri hanya wajib 1 kali selama memiliki harta tersebut.	berkembang, seperti rumah, bahkan kendaraan untuk dipakai sendiri tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
3.	<i>Aghniya (kaya) adalah orang kaya berdasarkan realita, bukan dianggap kaya.</i> Karena itu, orang yang tidak dianggap kaya, tapi memiliki surplus dari keseluruhan hartanya setelah dikurangi hutang maka ia wajib membayar zakat.	Orang yang wajib zakat adalah orang yang sudah mencapai nisab dengan ukuran tertentu, dengan kata lain memiliki harta dalam jumlah banyak seperti 40 ekor kambing, 5 ekor unta, dan emas 85 gram. Beberapa ulama fiqh bahkan menambahkan wajib zakat jika orang tersebut memiliki kekayaan yang lebih dari kebutuhan biasa tau kebutuhan rutin.
4.	Aturan seseorang dikategorikan sampai nisab adalah kekayaan terpadu dikurang hutang terpadu jika ada sisa plus berapapun	Nisab dalam fiqh adalah jumlah tertentu dari harta yang dimiliki seseorang sehingga ia dikategorikan wajib zakat. Jumlah tersebut bergantung pada jenis harta

	<p>besarnya berarti ia telah mencapai nisab dan wajib zakat.</p> <p>Jika tidak ada sisa atau nol berarti dia belum sampai nisab. Sedangkan jika harta terpadu dikurangi hutang, minus, berarti dia termasuk dhuafa yang harus disantuni dengan zakat.</p>	<p>yang akan dikeluarkan zakatnya. Contoh aturan nisab tersebut diantaranya kambing jika sudah mencapai 40 ekor (maka wajib dizakatkan 1 ekor kambing); unta 5 ekor (dengan zakat 1 ekor kambing); atau sapi 30 ekor dengan zakat 1 ekor sapi berumur 1 tahun; emas jika mencapai 85 gram (dengan zakat 2,5%); perdagangan setara nisab emas; dlsb.</p>
5.	<p><i>Haul</i> adalah jangka waktu yaitu satu tahun untuk seseorang wajib mengeluarkan zakat. Dalam konsep ulama Kendal, seluruh harta dihitung secara keseluruhan dalam satu tahun. Karena itu, zakat pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan ketika panen, tapi digabung dengan harta lain setelah genap satu tahun.</p>	<p><i>Haul</i> adalah masa satu tahun kepemilikan untuk jenis-jenis harta tertentu, yaitu ternak, uang, dan harta dagangan sehingga seseorang dikategorikan wajib membayar zakat. Sedangkan jenis harta lain seperti pertanian, buah-buahan, dan harta karun dikeluarkan pada saat panen atau saat ditemukan untuk harta karun.</p>

6.	Zakat tidak sah jika diberikan langsung kepada mustahik dan harus melalui amil zakat.	Zakat langsung kepada mustahik tidak dilarang oleh aturan fiqh dan dilakukan oleh mayoritas umat Islam dewasa ini.
----	--	---

Ternyata *reinterpretasi* zakat yang dirumuskan oleh Muhammadiyah Kendal terkait erat dengan *akuntansinya*.

*Accountancy*¹⁰ *The maintaining or inspecting of commercial account (a list of debits and credits or charges).* usaha mengurus atau memeriksa dari akun-akun berharga (Sesuatu yang berupa debit dan kredit atau pembiayaan yang **bernilai jual lebih /bisa dijual=*commercial***)

*Commercial*¹¹ *Product for mass consumption with profit as primary aim.* Sesuatu yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dengan keuntungan sebagai tujuan utamanya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah menyangkut *pemikiran hukum zakat* Muhammadiyah Kendal dengan fokus pembahasan keberhasilan *gerakan zakat* Muhammadiyah di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri. Secara lebih spesifik persoalan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah (a) pemahaman baru masalah zakat yang berbeda dengan rumusan fiqh klasik maupun UU RI No.38 Tahun 1999 tentang

¹⁰ Merio Pei. *op cit.*, vol. I, page 8.

¹¹ *Ibid.* (vol I, page 202).

pengelolaan zakat yang lahir 20 tahun sesudahnya? (b) Bagaimana Muhammadiyah Kendal menafsir kembali dan mengaktualisasi doktrin zakat.(c) Bagaimana relevansi *Zakat Kita* dengan perubahan sosial dan pembaruan hukum.

C. Signifikasi Penelitian

Studi mencoba memberi jawaban dari permasalahan permasalahan diatas, sehingga didapati satu pemahaman integral perihal kekayaan secara terminologis, kebijakan persyarikatan yang dilakukan oleh ulama lokal Muhammadiyah dan metode yang dirancang oleh ulama ushul dan metode ijtihad yang ditempuh oleh persyarikatan Muhammadiyah. Penelitian ini diharapkan bisa berimplikasi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bisa memberi pemahaman baru yang lebih tepat, untuk dilakukan pengujian selanjutnya oleh Pimpinan Pusat Majelis Tarjih sehingga menjadi fiqh atau produk ijtihad Muhammadiyah yang dikodifikasi.

Secara praksis, hasil temuan dalam buku *Zakat Kita* dan pelaksanaannya di Kecamatan Weleri ini menjadi stimulan bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah, bahwa keberhasilan pengelolaan zakat adalah “*suatu proses*” yang tidak dimulai dari titik nol dan ruang hampa. Sebagai upaya antisipatif melalui proses istinbath dan ijtihad, tajdid atau pembaharuan dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah akan terus berkembang, yakni dengan melakukan upaya refleksi pemikiran masa lalu, sebagai konsiderasi tajdid dan ijtihad kekinian guna mencari solusi dan pemecahan masalah praktis yang sedang berlangsung dan akan terjadi. Disinilah relevansi praktis penelitian ini diperankan.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini dan sepanjang yang diketahui oleh penulis, belum ada suatu kajian khusus yang membahas tentang reinterpretasi dan akuntansi zakat dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah Kendal dalam buku pedoman *zakat kita* karya Abdul Barie Shoim. Tentu telah ada beberapa karya yang dalam satu atau cara membahas sejumlah permasalahan yang sejenis. Sekalipun demikian karya tersebut sebagai sebuah laporan penelitian yang disajikan oleh Tuti Alawiyah Najib. Laporan dimaksud lebih merupakan studi terhadap keberhasilan Bapelurzam Kendal dalam menghimpun dan mengelola zakat maal diantara organ Muhammadiyah dan menggambarkan dinamika gerakan zakat dalam Muhammadiyah dan untuk mengetahui realitas gerakan zakat di organisasi Muhammadiyah harus dilakukan pada tingkat daerah. Laporan tersebut telah diterbitkan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam sebuah buku yang berjudul *Revitalisasi Filantropi Islam* studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia.

Model penelitian lainnya, berupa kajian sistem pendidikan sadar zakat Bapelurzam Kendal oleh Musman Tholib dalam tesis masternya, sejauh yang dibaca penulis, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek pendidikan sadar zakat, sekalipun menyorot ijtihad Abdul Barie Shoim, tetapi tidak berkaitan dengan metode istinbath terutama dengan maqasid syari'ah. Demikian pula reinterpretasi *amwal dan nishab* berikut akuntansinya yang sejalan dengan terminology normatip Alqur'an.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang akan digunakan untuk menjawab berbagai persoalan diatas adalah teori maqasid syari'ah .Melalui maqasid ini, ayat ayat alqur'an dan hadits hadits hukum yang secara kuantitatif terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh kedua sumber nash normatif tersebut. .Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbath, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *urf* yang pada satu sisi juga disebut sebagai dalil.¹²

Farid Esack mengungkapkan bahwa usaha seseorang untuk memaknai yang dibaca dan dialaminya senantiasa dalam konteks tertentu. Diri tak bisa menghindar begitu saja dari pertemuan manapun dengan teks apa pun tanpa membawa beberapa hal darinya dan meninggalkan beberapa hal dari diri.¹³ Dan hukum Islam adalah hasil olah pikir diri yang sedikit banyak merefleksikan dimensi ruang dan waktu.

Perdebatan dan teoritisasi mengenai pergumulan hukum dan perubahan sosial yang melahirkan *ijtihad* telah banyak terjadi dalam waktu yang cukup lama. Polarisasi masalah ini setidaknya mengarah pada dua kutub pandangan ekstrim.¹⁴ *Pertama*, hukum Islam dianggap tidak mempunyai *hikmah* dan *illat* (ratio legis) dibalik formula legal formalnya, karena dia adalah kehendak Tuhan. Sementara

¹² Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2005) hal. 233.

¹³ Farid Esack, *Membebaskan yang Tertindas : Alqur'an,Liberaalisme,Pluralisme*, terj. A.Watung Budiman (Bandung : Mizan, 2000); hlm. 36 – 38.

¹⁴ Nurcholish Majid, Prof . Dr. Munawir Syadzali: Antara diplomasi dan tugas kiai, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 tahun Prof . Dr. H. Munaqir Syadzali, MA* , (Jakarta: Paramadina, 1995) hal. 171 – 172. Lihat juga Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy : a Study Of Abu Ishaq ash Shatibi's Life and Thought*, terj. Yusdian W. Asmin. (Surabaya : al-ihlas, 1995), hal. 27 – 28.

Tuhan tidak terkait dengan ruang dan waktu sehingga hukum Islam, yang merupakan titah-Nya itu bersifat *trans histories* tidak terkait oleh alasan atau latar belakang sosial apapun. Walaupun “terpaksa” ada, ia tidak mungkin dapat diketahui karena merupakan bagian dari “misteri ilahi” atau kehendak Tuhan itu sendiri. Dengan demikian akal tidak mempunyai peran apapun selain memahami doktrin teks agama yang sudah *taken for granted*. Kedua, hukum Islam dianggap memiliki *illah*, *hikmah*, dan tujuan. Sebab, jika tidak, berarti Tuhan menciptakan sesuatu sia-sia, sesuatu yang mustahil ada pada dzat Tuhan. Dia memberikan akal kepada manusia agar bisa menangkap gejala sosial dan rahasia alam. Tidak ada kontradiksi antara wahyu dan akal, keduanya adalah ciptaan Allah, karena-Nya manusia dapat memahami perputaran hukum, konsekuensinya hukum Islam terikat dan harus dipahami dengan sosio cultural yang mengelilinginya. Pada posisi yang demikian, akal mempunyai peran vital dalam menunaikan tugas ijtihad.

Dengan perspektif diatas, penulis berasumsi bahwa produk pemikiran tentang zakat di Kabupaten Kendal menampakkan kecenderungan yang kedua yang mengarah pada adaptabilitas hukum Islam dalam konteks masyarakat Kendal. Untuk mengetahui sejauh mana teori ini menjiwai lahirnya pemikiran tentang zakat tersebut di atas, kita dapat mengukurnya dengan *istislah* sebagai imbalan *equity* (keadilan). Selain itu seperti diilustrasikan oleh Tyan,¹⁵ metode *istihsan* dan *siyasah syar’iyyah* dapat juga dimanfaatkan dalam mendukung pemahaman ini. Metode metode ini dikedepankan sebagai bagian dari istinbath hukum melalui *maqashid syari’ah* dengan mengesampingkan *qiyas*, karena dia

¹⁵ Lihat Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic lega*, hal. 41.

tidak lagi dianggap mampu menjangkau dimensi transformasi sosial, yang seringkali tak terduga dan tak terkirakan. Metode *qiyas* terlalu memasung dan “membonsai” pikiran untuk terjatuh dalam maklumat *illat* (kausa hukum) dalam teks yang rigid dan kaku.¹⁶ Dengan demikian, sesuai dengan sifatnya, walaupun sebagai ukuran, metode *qiyas* dipergunakan dalam bingkai konsep *masalah* terendah.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode amat penting, karena dia membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Sebab bisa saja terjadi, suatu ilmu mempunyai obyek yang sama dengan ilmu lain. Perbedaannya ditentukan oleh cara khusus yang diterapkan dalam masing masing ilmu untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai obyek yang bersangkutan.¹⁸ Perbedaan metode yang diterapkan untuk menyelidiki suatu obyek akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda sifatnya.

Menurut pernyataan al Gazzali seperti dikutip oleh Syamsul Anwar dalam pengembangan metode penelitian hukum Islam, bahwa obyek kajian ilmu syari’ah (ilmu hukum Islam) adalah tingkah laku kaitannya dengan norma hukum. Obyek kajian ilmu ilmu keagamaan Islam versi al Gazzali dengan mengatakan, “Ahli hukum mengambil sisi tertentu, yaitu tingkah laku subyek

¹⁶ Lihat Ahmad Zaki Yamani, *Syari’at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terj.M. Sonhadji, (Jakarta:PT Intermasa, 1977), hal. 17 – 24 ; Nasr Hamid Abu Zayd, *Imam Syafi’I Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, terj. Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakarta : LKIS, 1997) hal. 78–87.

¹⁷ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia : Dari Nalar Paarsipatoris Hingga Emansipatoris* , (Yogyakarta : LKIS, 2005), hal. 17.

¹⁸ Amin Abdullah, et. al, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, editor: Dr. Ainurofiq, MA (Djogjakarta : Ar Ruzz Press, 2002) hal. 152.

hukum, yang diselidikinya berkaitan dengan dictum hukum”¹⁹. Pernyataan Gazzali ini akan lebih menarik karena memberi peluang kepada pendekatan empiris dalam kajian hukum. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa analisis hukum tidak sekedar pada format teks, tetapi juga pada tingkah laku.

Berangkat dari konsep al Gazzali ini ,dapat dikembangkan suatu metode kajian hukum Islam yang oleh Mukti Ali disebut sebagai metode *sinthesis* yaitu pendekatan *ilmiah cum doktriner*,²⁰ yang disebut juga dengan metode *sui generis –kum-empiris*. Dalam metodologi klasik penelitian hukum Islam yang bersifat normatif²¹ sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nash maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk nash meliputi ayat ayat ahkam dan hadits hadits ahkam, sedangkan yang sudah berbentuk pikiran manusia yang sudah berbentuk pikiran manusia meliputi kitab fiqh, yurisprudensi, fatwa ulama’, dan bentuk aturan lain yang mengikat masyarakat Islam.

Penelitian normatif hukum Islam umumnya bersifat *sui generis*,²² dalam arti penyelidikan norma norma hukum Islam lebih banyak dilihat dari segi ajaran normatif dan karenanya terfokus pada teks. Syamsul Anwar dalam *Mazhab Yogya* membedakan penelitian normatif hukum Islam menjadi (i) penelitian norma-norma in concreto, (ii) penelitian azaz-azaz hukum, dan (iii) penelitian nilai-nilai dasar. Atas dasar tiga pembedaan ini dan tesis al Gazzali tentang konvergensi antara wahyu dan akal (yang meliputi rasio dan pengalaman)

¹⁹ Al Gazzali, *al Mustasfa fii ‘Ilm al Usul* (Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 2000) hal. 7.

²⁰ Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991) hal. 31.

²¹ M.Amin Abdullah, dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu Ke Islamian*, (Yogyakarta : SUKA Press, 2003) hal. 179.

²² M.Amin Abdullah, *Mazhab Yogya*, hal. 161.

manusia dan pandangannya, penelitian normatif hukum Islam dikembangkan tidak hanya melalui teks saja yang bersifat *sui generis*, tetapi juga perpaduan dengan pengalaman, maka penelitian ini mengacu pada metode *sui generis-kum-empiris*, yang berarti, norma-norma hukum tidak hanya dicari dalam teks syari'ah, tetapi juga dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Apabila hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan teks, maka kenyataan itu direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam hubungan dialektis²³. Pemaduan yang dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks syari'ah dan pengalaman eksistensial manusia dalam suatu lokasi sosial tertentu akan memberi wawasan, bagaimana teks syari'ah itu dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini pertama kali akan mengemukakan dan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika bab yang ada dalam penelitian ini. Semua uraian pada bab ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan –pertanyaan metodologis : apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan .

Pada bagian kedua, studi ini berupaya mereportasi politik hukum dan ijtihad Muhammadiyah, yang terdiri : Hakekat Politik Hukum dan Ijtihad ;

²³ Bandingkan Syamsul Anwar dalam Mazhab Yogya, *Ibid*, hal.162.

Kedudukan dan metode ijtihad; Metode Ijtihad Muhammadiyah; Ijtihad *Zakat Kita* yang menjadi pedoman bagi masyarakat Muhammadiyah Kendal. Signifikasi pembahasan ini adalah untuk mengetahui paralelisme metode pemikiran hukum ulama klasik dan yang dipergunakan oleh Muhammadiyah serta relasinya dengan produk pemikiran dalam buku zakat kita, sehingga dapat diketahui gerak keberanjakan yang terjadi didalamnya, disamping sebagai sarana analisis berikutnya.

Pada bagian ketiga, studi ini berusaha menintrodusir produk pemikiran dalam buku *Zakat Kita* tentang reinterpretasi dan akuntansi zakat dengan sub – sub judul : *Amwal, Aghniya' Nishab*, dan *haul*. Yang akan diberi komentar sekilas dengan memperbandingkan konsepnya Yusuf Qardlawi.

Sedangkan analisis pada bab IV, dibawah judul “Relevansi Ijtihad Zakat Kita dengan Pembaruan Hukum Islam “ lebih mengarah pada Perubahan sosial dan Perubahan Hukum yang mempunyai andil dalam mengkonstruksi pemikiran hukum *Zakat Kita* di Muhammadiyah Kendal. Dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya; Konsep kekayaan versi ulama fiqh dan ekonomi ; Nishab dan standar kecukupan merupakan dua sudut pembahasan tentang konsep *amwal* dan nishab dalam pemikiran hukum *Zakat Kita*, sedang; Relasi Politik Hukum dengan Ijtihad *Zakat Kita* dan Metode Ijtihad Muhammadiyah, merupakan analisis akhir yang ditujukan untuk membuat proyeksi fiqh Muhammadiyah yang mungkin diaplikasikan dan dikembangkan di masa depan.

Adapun pada bab V, yang merupakan bagian penutup, memuat kesimpulan dan saran. Dua hal ini dihadirkan karena signifikasinya sebagai

pertimbangan sejauh mana studi ini dilakukan, saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian lebih lanjut, karena dalam nalar penulis tidak berpretensi bahwa studi ini telah dilakukan secara sempurna, sebab dengan segala keterbatasan paradigma dan pendekatan masalah yang berbeda, kesimpulan akhirnya juga menjadi berbeda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Signifikasi Penelitian.....	10
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II POLITIK HUKUM DAN IJTIHAD MUHAMMADIYAH

A. Hakekat Politik Hukum dan Ijtihad

1. Relasi Politik Hukum dan *Siyasah Syar'iyah* 19
2. Ijtihad dan Obyeknya
 - a. Ijtihad Masa Awal 30
 - b. Ijtihad Secara Teknis 36
 - c. Obyek Ijtihad 42
 - d. Obyek Ijtihad Zakat 44

B. Kedudukan dan Metode Ijtihad

1. Kedudukan Ijtihad 48
2. Metode Ijtihad 52
 - a. Metode Kebahasaan 52
 - b. Metode *Maqashid Al Syari'ah* 56

C. Metode Ijtihad Muhammadiyah 60

BAB III IJTIHAD MUHAMMADIYAH KENDAL TENTANG REINTERPRETASI DAN AKUNTANSI ZAKAT

A. Ijtihad Zakat Kita 73

Reinterpretasi Zakat

- a. *Amwal* 75
- b. *Aghniya'* 77
- c. *Nisab* 81
- d. *Haul* 83

e. Zakat Harus Lewat Amil.....	85
B. Aplikasi <i>Zakat Kita</i>	
Akuntansi Zakat	91
 BAB IV RELEVANSI IJTIHAD ZAKAT KITA DENGAN	
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM	
A. Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum.....	100
B. Konsep Kekayaan Versi Ulama Fiqih Ekonomi	
1. Definisi Harta (Mal) Secara Bahasa.....	109
2. Definisi Harta Menurut Ulama Syari'ah.....	110
a. Hanafiyah (Madzhab Hanafi).....	111
b. Jumhur Fuqaha.....	116
3. Definisi Harta Versi Ahli Ekonomi	118
C. Nishab dan Standar Kecukupan	119
1. Standar Kecukupan.....	121
2. Standar Kekayaan Minimal	130
D. Relasi Politik Hukum dengan Ijtihad <i>Zakat Kita</i> dan	
Metode Ijithad Muhammadiyah.....	135
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	152
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	156

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Contoh Penghitungan Neraca Kekayaan.....	94
Tabel 3.2. Perkembangan Perolehan Zakat <i>Amwal</i> Bapelurzam Cabang Weleri.....	95